

Daftar Isi

SAMBUTAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL – ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	3
SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA BURSA EFEK INDONESIA	5
KATA PENGANTAR	7
Daftar Isi	10
BAB 1	16
PASAR MODAL	16
1.1. Pendahuluan	16
1.2. Lintasan Sejarah Pasar Modal	18
1.3. Landasan Hukum Pasar Modal	22
1.3.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal	22
1.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011	23
1.3.3. Peraturan Pemerintah Khusus terkait Pasar Modal	25
1.4. "Rule Making Rule (RMR)"	26
1.5. Struktur Organisasi Pasar Modal	26
1.5.1. Pengawas Pasar Modal	27
1.5.2. Penyelenggara Pasar Modal	30
1.5.3. Pengelolaan Investasi	38
1.5.4. Pelaku, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	39
BAB 2	45
TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	45
2.1. Pendahuluan	45
2.2. Tata Kelola dan Performa Perusahaan	47
2.3. Kilas Balik Perkembangan Tata Kelola Perusahaan	50
2.3.1. Selayang Pandang GCG di Dunia Internasional	50
2.3.2. Sejarah Lahir GCG dan Perkembangannya di Indonesia	52
2.3.3. Pedoman GCG	61
Pedoman Penerapan GCG	62
2.4. Manfaat GCG	63
2.5. Kerangka Hukum Dan Peraturan	66
2.5.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	66
2.5.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	66

2.5.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	66
2.5.4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	66
2.5.5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal	67
2.5.6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing	67
2.6. Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	67
2.6.1. Transparansi (Transparency)	67
2.6.2. Akuntabilitas (Accountability)	68
2.6.3. Responsibilitas (Responsibility)	70
2.6.4. Independensi (Independency)	70
2.6.5. Kewajaran dan Kesenjangan (Fairness)	71
2.7. Penghargaan dan Penilaian Tata Kelola Perusahaan	71
2.7.1. Penghargaan kepada Perusahaan	72
2.7.2. Penilaian Tata Kelola suatu Negara	73
BAB 3	76
PERUSAHAAN dan STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN	76
3.1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan	76
3.1.1. Visi Perusahaan	76
3.1.2. Misi Perusahaan	77
3.1.3. Nilai-Nilai Perusahaan	78
3.2. Sekilas Mengenai Perseroan Terbatas	79
3.2.1. Perseroan Terbatas	79
3.2.2. Perusahaan Terbuka dan Tercatat di Bursa	80
3.3. Struktur Organisasi Perusahaan	81
3.4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	82
3.4.1. Tipe RUPS	83
3.4.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan RUPS	83
3.5. Dewan Komisaris	87
3.5.1. Pedoman Pokok Dewan Komisaris	88
3.5.2. Sekretaris Dewan Komisaris	91
3.6. Direksi (Board of Directors)	91
3.6.1. Pedoman Pokok Direksi	91
3.7. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	95

3.8.	Corporate Secretary	96
3.8.1.	Peran dan Tugas Corporate Secretary	98
3.9.	Satuan Pengawasan Internal/ Audit Internal	98
3.9.1.	Tugas Satuan Pengawasan Internal/ Audit Internal	99
3.10.	Komite Audit	99
3.11.	Komite Nominasi dan Remunerasi	100
3.12.	Komite Good Corporate Governance (GCG)	101
3.13.	Komite Manajemen Risiko	101
BAB 4		102
CORPORATE SECRETARY		102
TABEL 4.1. ATURAN CORPORATE SECRETARY DI BEBERAPA NEGARA		102
4.1.	Peran Corporate Secretary	102
4.2.	Kode Etik Corporate Secretary	103
4.2.1.	Integrity/ Integritas	104
4.2.2.	Accountability/ Akuntabilitas	104
4.2.3.	Stewardship/ Penatalayanan	105
4.2.4.	Transparency/ Transparansi	106
4.2.5.	Separation Board and Management/ Pemisahan Pengawas dan Pelaksana	106
4.2.6.	Corporate Responsibility to Society and the Environment / Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan	107
4.3.	Fungsi dan Tugas Corporate Secretary	107
4.4.	Kualifikasi Corporate Secretary	110
4.5.	Independensi Corporate Secretary	112
4.6.	Penunjukan Corporate Secretary	113
4.7.	Mengembangkan Kebijakan dan Praktek Tata Kelola Perusahaan ...	114
4.8.	Mendukung Direksi dalam Bidang Legal dan Organisasi	115
4.9.	Menyelenggarakan Rapat Direksi	116
4.10.	Memberikan program orientasi kepada Anggota Direksi yang Baru.....	116
4.11.	Memberikan Akses Informasi	116
4.12.	Memberikan masukan dalam bidang Tata Kelola Perusahaan.....	116
4.13.	Melindungi Hak-Hak Pemegang Saham	117
4.14.	Menyelenggarakan RUPS	117
4.14.	Menjadi Penghubung selama Control Transaction	118
4.15.	Membantu dalam Menegakkan Hak-hak Pemegang Saham....	118
4.16.	Membantu Penyelesaian Konflik Perusahaan	118
4.17.	Membantu dalam Transparansi dan Keterbukaan Informasi ...	119
4.18.	Hubungan Intra-Organisasi	119
4.19.	Asosiasi Profesional Corporate Secretary	120
4.20.	Tantangan Corporate Secretary di Masa Depan	121

BAB 5	122
KEPATUHAN	122
5.1. Prinsip Kesetaraan	122
5.2. Perangkat Organisasi Perusahaan dalam Mendukung Kepatuhan	123
5.3. Pelaporan Berkala dan Insidental	124
5.3.1. Prioritas Kepatuhan	124
5.3.2. Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik	125
5.3.3. Laporan Berkala	128
5.3.4. Laporan Insidental	130
5.3.5. Kewajiban Public Expose	130
BAB 6	132
KOMUNIKASI PUBLIK	132
6.1. Konsep Dasar Komunikasi	132
6.1.1. Komponen Komunikasi	132
6.1.2. Model Komunikasi	133
6.2. Komunikasi Publik	134
6.2.1. Ciri-Ciri Komunikasi Publik	135
6.2.2. Peran Komunikasi Publik dalam Perusahaan	135
6.2.3. Penyampaian Komunikasi Publik	136
6.2.4. Target Komunikasi Publik	137
6.3. Corporate Secretary sebagai "Corporate Communication Officer" ..	137
6.3.1. Peran Corporate Secretary sebagai Public Relations	138
6.3.2. Internal Relation	138
6.3.3. Publik Eksternal	139
6.3.4. Etika Corporate Secretary dalam Komunikasi	140
6.5. Siaran Pers	140
6.6. Investor relations	141
6.6.1. Kegiatan Investor Relations	141
6.6.3. Pihak-Pihak Terkait Investor Relations	142
6.6.4. Tujuan Investor Relations	142
6.6.5. Evaluasi Keberhasilan Investor Relations	142
Bab 7	143
EKONOMI DAN KEUANGAN	143
7.1. Produk Domestik Bruto (PDB)	143
7.2. Inflasi	145
7.3. Suku Bunga	146
7.4. Laporan Keuangan	146
7.4.1. Definisi Akuntansi	147
7.4.2. Prinsip Dasar Akuntansi	147
7.4.3. Kegiatan Audit	152

7.4.4. Akuntan Publik	155
7.4.5. Analisa Rasio Laporan Keuangan	156
BAB 8	164
AKSI KORPORASI	164
8.1. Manajemen Strategis	164
8.2. Penawaran Saham	165
8.2.1. Go Public	165
8.2.2. Penawaran Saham Perdana	167
8.2.3. Rights Issue	167
8.2.4. Stock Split (pemecahan nilai saham)	168
8.3. Papan Bursa	169
8.3.1. Persyaratan Pencatatan di BEI	169
8.4. Dividen	171
8.5. Merger dan Akuisisi	172
8.6. Spin-Off	177
8.7. ESOP (Employee Stock Option Plan)	178
8.8. Transaksi Afiliasi	179
8.9. Transaksi Benturan Kepentingan	180
8.10. Transaksi Material	181
BAB 9	182
MANAJEMEN RISIKO	182
9.1. Definisi, Metode, dan Prinsip	182
9.1.1. Definisi	182
9.1.2. Metode Manajemen Risiko	182
9.1.3. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko	182
9.2. Proses Manajemen Risiko	184
9.3. Indikator Penanganan Risiko	185
9.4. Penanganan Risiko	185
9.5. Ruang Lingkup	188
9.5.1. Maksud dan Tujuan	188
9.6. Keberlanjutan Usaha	189
9.7. Komunikasi Risiko	189
9.8. Standarisasi Manajemen Risiko	190
9.9. Sistem Aplikasi Manajemen Risiko	190
BAB 10	191
PERTUMBUHAN dan KEBERLANJUTAN	191
10.1. Teori Pertumbuhan	191
10.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)	193

10.2.1.	Sekilas Sejarah dan Latar Belakang CSR	194
10.2.2.	Bentuk Praktek CSR di Indonesia	195
10.2.3.	Hukum dan Perundang-undangan Terkait CSR	196
10.2.3.1.	Aturan pada UU PT No 40 tahun 2007	196
10.2.3.2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007").....	197
10.2.3.3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009").....	198
10.2.3.4.	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007.....	198
10.2.3.5.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ("UU 22/2001")	199
10.2.3.6.	Pasar Bebas Versus Implementasi CSR.....	199
10.3.	Green Movement	199
10.4.	Sustainability Reporting	200
10.5.	Integrated Reporting (IR)	201
BAB 11		203
11.1.	Kemampuan khusus Corporate Secretary	203
11.2.	Ketrampilan Teknis dan Non Teknis	204
REFERENSI		207
APPENDIX		210
1.	King Code	210
a.	King Code I - 1994	210
b.	King Code II - 2002	210
1.	Directors and their responsibility	210
2.	Risk management	210
3.	Internal audit	210
4.	Integrated sustainability reporting	210
5.	Accounting and auditing	210
c.	King Code III - 2009	210
d.	King Code IV	211
2.	OECD	211
3.	Commonwealth-1999	211
4.	Indonesia SE OJK No 32 /SE/0JK.04/2015	213